

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SKPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka memenuhi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait dengan perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017. Sedangkan pada tingkat SKPD harus disusun dokumen Renstra-SKPD Tahun 2012-2017. RPJM Daerah dan Renstra-SKPD itu disusun untuk mewujudkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih menjadi acuan utama dalam penyusunan RPJM Daerah dan Renstra-SKPD.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyusun Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2012-2017.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Nomor 2);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 149).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dengan tersusunnya rencana strategis ini dimaksudkan agar kiranya semua pihak terkait (*stakeholders*), baik lingkup Dinas Perkebunan dan Kehutanan maupun organisasi atau lembaga lainnya dapat bekerja sama untuk mencapai visi, misi, serta tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah untuk dijadikan dasar atau acuan dalam penyusunan rencana kerja atau rencana operasional Dinas Kehutanan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah Tahun 2012–2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN ACEH TENGAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah
- 2.2. Sumberdaya Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah

- BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah
 - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
- 4.1. Visi dan Misi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah
 - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah
 - 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
- BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN ACEH TENGAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM KABUPATEN ACEH TENGAH**
- BAB VII. PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN ACEH TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah

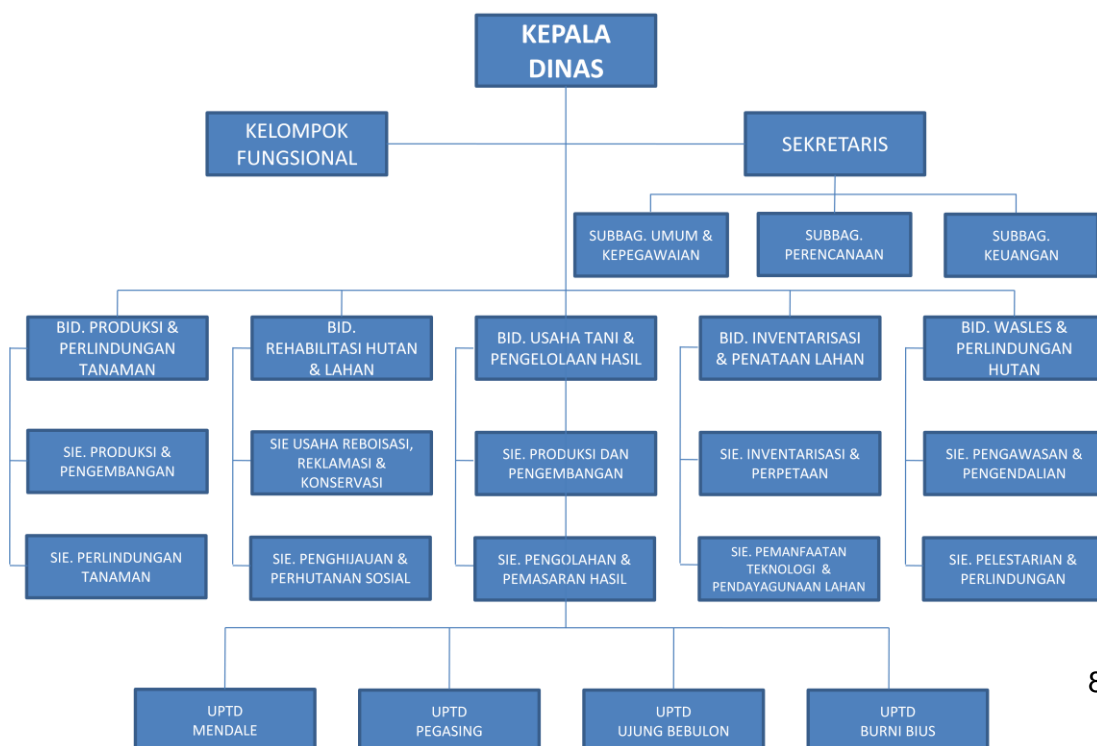
Sesuai Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan, pelestarian, dan perlindungan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. penyelenggaraan tugas perkebunan dan kehutanan termasuk perizinan dan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan pelestarian dan perlindungan hutan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan pelestarian dan perlindungan hutan;
- g. pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah terdiri atas 1 (satu) kepala dinas yang membawahi 1 (satu) sekretaris dan 5 (lima) bidang. Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Aceh Tengah

2.2. Sumberdaya Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah

Personil (SDM) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah pada akhir Tahun 2013 berjumlah 200 orang dan diperincikan berdasarkan status kepegawaian, pangkat/golongan, jabatan, dan jenjang pendidikan. Perincian lebih lengkap disajikan pada Tabel 1 s/d Tabel 4.

Tabel 1.

Susunan Pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	67
2.	Non PNS	133

Tabel 2.

Susunan Pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	45
3.	Golongan II	16
4.	Non PNS	133

Tabel 3.
Susunan Pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah
berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Struktural/Eselon II.b	1
2.	Struktural/Eselon III.a	1
3.	Struktural/Eselon III.b	5
4.	Struktural/Eselon IV.a	15
5.	Struktural/Eselon IV.b	4
6.	Non Struktural/Staf	166
7.	Fungsional (Polisi Hutan)	8

Tabel 4.
Susunan Pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah
berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	S3	-
2.	S2	2
3.	S1/D-IV	44
4.	Diploma	5
5.	SLTA	148
6.	SLTP	1
7.	SD	-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah

Tingkat capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra Periode 2007-2012 disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Aceh Tengah

Uraian	Anggaran (Rp x 1.000.000)					Realisasi Anggaran (Rp x 1.000.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung			3.371	3.786	4.068			3.332	3.771	4.016			98,8	99,6	98,7	9,9	9,8
Belanja Pegawai			3.371	3.786	4.068			3.332	3.771	4.016			98,8	99,6	98,7	9,9	9,8
Belanja Langsung			1.808	4.123	3.933			1.275	4.009	3.753			70,5	97,2	95,4	61,7	104,0
Belanja Pegawai			579	668	1.038			308	641	999			53,2	96,0	96,2	35,4	82,0
Belanja Barang dan Jasa			945	1.727	1.687			804	1.658	1.571			85,1	96,0	93,1	40,2	50,5
Belanja Modal			283	1.727	1.206			163	1.710	1.182			57,6	99,0	98,0	240,0	459,1

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah

Berdasarkan telaahan terhadap renstra kementerian/ lembaga terkait pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan meliputi Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Kementerian Kehutanan, dapat dijabarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan meliputi :

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi Dinas Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian meliputi :

- a. Memperbaiki produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan.
- b. Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah.
- c. Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan.
- d. Membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil.
- e. Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan
- f. Penciptaan *pricing policies* yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus.
- g. Persaingan global serta pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global.

- h. Memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.
- i. Memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan.
- j. Menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif.
- k. Pemenuhan kebutuhan pangan, disamping pengembangan komoditas unggulan hortikultura dan peternakan, serta peningkatankomoditas ekspor perkebunan.

Sedangkan tantangan yang dihadapi Dinas Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Kehutanan meliputi :

- a. Belum semua kawasan hutan dilakukan tata batas baik batas luar maupun batas fungsi.
- b. Belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan, khususnya pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di luar Pulau Jawa.
- c. Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan.
- d. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya upaya-upaya konservasi sumberdaya alam, khususnya dalam konteks pelestarian jenis-jenis flora dan fauna serta lingkungan abiotiknya.
- e. Lahan kritis termasuk kategori sangat kritis masih luas yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor.

- f. Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi jasa hutan.
- g. Kesenjangan antara *supply* dan *demand* bahan baku industri kehutanan, khususnya kayu, yang belum secara optimal disediakan dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat, disamping masih rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan.
- h. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan secara struktur belum secara nyata mendorong pengembangan/pemberdayaan perekonomian masyarakat.
- i. Minat investasi di bidang kehutanan yang kurang kondusif karena sering terhambat oleh permasalahan tenurial, tumpang tindih peraturan (pusat dengan daerah), dan kurangnya insentif permodalan, perpajakan dan retribusi.
- j. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.
- k. Pengembangan iptek kehutanan belum secara optimal menunjang untuk kebutuhan informasi dalam menetapkan kebijakan dan operasionalisasi teknis pengelolaan hutan di lapangan.
- l. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia (SDM), baik pada tatanan pemerintah terutama pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang pengembangan pelayanan berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian meliputi :

- a. Potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang berlimpah (*mega biodiversity*).
- b. Potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
- c. Potensi tenaga kerja untuk mendukung pengembangan pertanian.
- d. Tersedianya paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan kapasitas produksi aneka produk pertanian.
- e. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Kehutanan :

- a. Tumbuhnya investasi hutan alam, hutan tanaman dan industri.
- b. Lapangan kerja di sektor kehutanan yang cenderung meningkat.
- c. Semakin tingginya komitmen terhadap pengurusan hutan dari kementerian/lembaga lain.
- d. Pendanaan APBN yang semakin berorientasi terhadap kinerja.
- e. Dana dan bantuan luar negeri untuk membantu pengurusan hutan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya meliputi :

1. Rendahnya produktivitas kopi arabika sebagai komoditi unggulan lokal;
2. Rendahnya penerapan teknik dan teknologi pasca panen kopi;
3. Rendahnya aktivitas pengembangan komoditi perkebunan selain kopi dan tebu;
4. Tingginya luasan lahan kritis
5. Rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal
6. Tingginya perambahan dan tekanan terhadap eksistensi kawasan hutan

Identifikasi permasalahan yang dihadapi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan lebih terperinci pada Tabel 7.

Tabel 7
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini (Tahun 2012)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
7. Rendahnya produktivitas kopi arabika sebagai komoditi unggulan lokal;	720 Kg/Ha/Tahun	1.200 Kg/Ha/Tahun	- Rendahnya koordinasi dengan tenaga penyuluh	- Rendahnya kemampuan petani kopi melaksanakan intensifikasi dan peremajaan/ rehabilitasi tanaman tua - Belum tersedia kebun induk kopi unggulan lokal - Tingginya serangan hama PBKo - Tingginya serangan penyakit jamur akar kopi	Solusi : - Membangun sistem koordinasi dengan tenaga penyuluh - Mengusulkan anggaran untuk membantu petani kopi melaksanakan intensifikasi dan peremajaan/ rehabilitasi tanaman tua - Pembangunan kebun induk Kopi Gayo 1 dan Gayo 2 - Pembangunan sarana prasarana (laboratorium) pengendalian hama dan penyakit kopi
8. Rendahnya penerapan teknik dan teknologi pasca panen kopi;	Pengolahan tradisional		- Rendahnya koordinasi dengan tenaga penyuluh	- Rendahnya kemampuan petani kopi mengadakan sarana prasarana pasca panen	Solusi : - Membangun sistem koordinasi dengan tenaga penyuluh - Mengusulkan anggaran untuk membantu petani kopi menerapkan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini (Tahun 2012)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
					teknologi pasca panen
9. Rendahnya aktivitas pengembangan komoditi perkebunan selain kopi dan tebu;	Komoditi kopi dan tebu	Komoditi perkebunan unggulan Kementerian Pertanian	- Rendahnya koordinasi dengan tenaga penyuluh	- Rendahnya minat dan kemampuan petani melaksanakan diversifikasi budidaya komoditi perkebunan	Solusi : - Membangun sistem koordinasi dengan tenaga penyuluh - Pemberian insentif kepada petani yang melaksanakan diversifikasi budidaya komoditi perkebunan pada sentra-sentra produksi lokal -
10. Tingginya luasan lahan kritis	37.888 Ha		- Rendahnya koordinasi dengan tenaga penyuluh	- Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh kehutanan - Rendahnya motivasi masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan swadaya - Terbatasnya anggaran pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan	Solusi : - Membangun sistem koordinasi dengan tenaga penyuluh
11. Rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal				- Kebijakan <i>moratorium logging</i> yang melarang	Solusi : - Mendorong perusahaan pemegang ijin pengusahaan hutan tanaman

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini (Tahun 2012)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
				penebangan/ peredaran kayu yang berasal dari hutan alam - Rendahnya potensi kayu yang berasal dari hutan milik/ hutan rakyat - Perusahaan pemegang ijin pengusahaan hutan tanaman tidak melaksanakan operasional produksi kayu	untuk melaksanakan operasional produksi kayu guna memenuhi kebutuhan lokal - Pengembangan Hutan Rakyat pada lahan milik - Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada kawasan hutan produksi
12. Tingginya perambahan dan tekanan terhadap eksistensi kawasan hutan			- Rendahnya posisi tawar dinas karena potensi konflik yang tinggi	- Sulitnya merubah budaya lokal masyarakat melaksanakan budidaya komoditi kopi/ komoditi perkebunan lainnya	Solusi : - Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah

Visi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah "Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera pada Tahun 2017". Visi tersebut akan diwujudkan melalui 6 (enam) misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, yaitu :

1. Melanjutkan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam dan memantapkan peningkatan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Melanjutkan pemantapan perekonomian rakyat, mengurangi angka pengangguran, dan membuka lapangan kerja di berbagai sektor;
3. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi strategis serta infrastruktur lainnya;
4. Melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan mampu menguasai teknologi;
5. Melanjutkan peningkatan dan pemantapan kualitas pelayanan kesehatan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan;
6. Melanjutkan pemantapan perwujudan iklim kehidupan masyarakat yang damai, tertib, kreatif, inovatif, dan mandiri.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan akan fokus

untuk mendukung misi ke-2 dan misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah melalui program-program :

- Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
- Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
- Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
- Program rehabilitasi hutan dan lahan
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- Program perencanaan dan pengembangan hutan

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah (Tabel 7), dapat dipaparkan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah. Faktor- faktor penghambat pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah tersebut meliputi :

1. Rendahnya koordinasi dengan tenaga penyuluh
2. Rendahnya kemampuan petani kopi melaksanakan intensifikasi dan peremajaan/ rehabilitasi tanaman tua
3. Belum tersedia kebun induk kopi unggulan lokal
4. Tingginya serangan hama PBKo
5. Tingginya serangan penyakit jamur akar kopi

6. Rendahnya kemampuan petani kopi mengadakan sarana prasarana pasca panen
7. Rendahnya minat dan kemampuan petani melaksanakan diversifikasi budidaya komoditi perkebunan
8. Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh kehutanan
9. Rendahnya motivasi masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan swadaya
10. Terbatasnya anggaran pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan
11. Kebijakan *moratorium logging* yang melarang penebangan/ peredaran kayu yang berasal dari hutan alam
12. Rendahnya potensi kayu yang berasal dari hutan milik/ hutan rakyat
13. Perusahaan pemegang ijin perusahaan hutan tanaman tidak melaksanakan operasional produksi kayu
14. Rendahnya koordinasi dengan tenaga penyuluh
15. Sulitnya merubah budaya lokal masyarakat melaksanakan budidaya komoditi kopi/ komoditi perkebunan lainnya

Sedangkan faktor- faktor pendorong pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah meliputi :

1. Semakin tingginya kepedulian *stakeholders* bagi pengembangan kopi arabika
2. Tersedianya dukungan teknologi dari lembaga penelitian dan pengembangan kopi
3. Tersedianya lahan bagi pengembangan komoditi perkebunan selain kopi dan tebu

4. Dukungan *stakeholders* bagi aktivitas rehabilitasi hutan dan lahan
5. Keberadaan pemegang konsesi hutan yang dapat memproduksi kayu
6. Adanya kebijakan pemanfaatan kayu rakyat dan pemanfaatan kayu tanah milik
7. Dukungan pemerintah provinsi serta *stakeholders* lainnya

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah selengkapnya disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan
 terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah

Visi : Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera pada Tahun 2017				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>Misi 2 : Melanjutkan pemantapan perekonomian rakyat, mengurangi angka pengangguran, dan membuka lapangan kerja di berbagai sektor</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan 2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 	<p>13. Rendahnya produktivitas kopi arabika sebagai komoditi unggulan lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya koordinasi dengan tenaga penyuluh - Rendahnya kemampuan petani kopi melaksanakan intensifikasi dan peremajaan/ rehabilitasi tanaman tua - Belum tersedia kebun induk kopi unggulan lokal - Tingginya serangan hama PBKo - Tingginya serangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tingginya kepedulian <i>stakeholders</i> bagi pengembangan kopi arabika

Visi : Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera pada Tahun 2017

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan</p> <p>4. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan</p>	<p>14. Rendahnya penerapan teknik dan teknologi pasca panen kopi</p>	<p>penyakit jamur akar kopi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kemampuan petani kopi mengadakan sarana prasarana pasca panen 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dukungan teknologi dari lembaga penelitian dan pengembangan kopi
	<p>5. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan</p> <p>6. Program rehabilitasi hutan dan lahan</p> <p>7. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</p> <p>8. Program perencanaan dan pengembangan hutan</p>	<p>15. Rendahnya aktivitas pengembangan komoditi perkebunan selain kopi dan tebu</p> <p>16. Tingginya luasan lahan kritis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya minat dan kemampuan petani melaksanakan diversifikasi budidaya komoditi perkebunan - Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan bagi pengembangan komoditi perkebunan selain kopi dan tebu - Dukungan <i>stakeholders</i> bagi aktivitas rehabilitasi hutan dan lahan
2.	Misi 3 :			

Visi : Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera pada Tahun 2017

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi strategis serta infrastruktur lainnya Program</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan 2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 	<p>17. Rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya motivasi masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan swadaya - Terbatasnya anggaran pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan pemegang konsesi hutan yang dapat memproduksi kayu - Adanya kebijakan pemanfaatan kayu rakyat dan pemanfaatan kayu
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 4. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 		<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan <i>moratorium logging</i> yang melarang penebangan/ peredaran kayu yang berasal dari hutan alam 	

Visi : Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera pada Tahun 2017

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	5. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	18. Tingginya perambahan dan tekanan terhadap eksistensi kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya potensi kayu yang berasal dari hutan milik/ hutan rakyat - Perusahaan pemegang ijin perusahaan hutan tanaman tidak melaksanakan operasional produksi kayu - Rendahnya koordinasi dengan tenaga penyuluh - Sulitnya merubah budaya lokal masyarakat melaksanakan budidaya komoditi kopi/ komoditi perkebunan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - tanah milik - Adanya kebijakan pemanfaatan kayu rakyat dan pemanfaatan kayu tanah milik - Dukungan pemerintah provinsi serta <i>stakeholders</i> lainnya

Visi : Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera pada Tahun 2017

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPA

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kehutanan, Renstra Dinas Perkebunan Aceh, dan Renstra Dinas Kehutanan Aceh, meliputi :

1. Belum tersedia kebun induk kopi unggulan lokal
2. Tingginya serangan hama PBKo
3. Tingginya serangan penyakit jamur akar kopi
4. Rendahnya kemampuan petani kopi mengadakan sarana prasarana pasca panen
5. Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh kehutanan
6. Rendahnya motivasi masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan swadaya
7. Kebijakan *moratorium logging* yang melarang penebangan/ peredaran kayu yang berasal dari hutan alam
8. Rendahnya potensi kayu yang berasal dari hutan milik/ hutan rakyat

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan meliputi :

1. Semakin tingginya kepedulian *stakeholders* bagi pengembangan kopi arabika
2. Tersedianya dukungan teknologi dari lembaga penelitian dan pengembangan kopi
3. Tersedianya lahan bagi pengembangan komoditi perkebunan selain kopi dan tebu

4. Keberadaan pemegang konsesi hutan yang dapat memproduksi kayu
5. Adanya kebijakan pemanfaatan kayu rakyat dan pemanfaatan kayu tanah milik

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah, ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), meliputi :

1. Rendahnya minat dan kemampuan petani melaksanakan diversifikasi budidaya komoditi perkebunan
2. Rendahnya motivasi masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan swadaya
3. Kebijakan *moratorium logging* yang melarang penebangan/ peredaran kayu yang berasal dari hutan alam
4. Rendahnya potensi kayu yang berasal dari hutan milik/ hutan rakyat
5. Sulitnya merubah budaya lokal masyarakat melaksanakan budidaya komoditi kopi/ komoditi perkebunan lainnya

Sedangkan faktor- faktor pendorong pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah meliputi :

1. Tersedianya lahan bagi pengembangan komoditi perkebunan selain kopi dan tebu

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan review terhadap faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perkebunan Aceh dan Renstra Dinas Kehutanan Aceh;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah; serta
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah;

selanjutnya dilakukan penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah. Isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah 2012-2017 meliputi :

1. Rendahnya produktivitas kopi arabika sebagai komoditi unggulan lokal;
2. Rendahnya penerapan teknik dan teknologi pasca panen kopi;
3. Rendahnya aktivitas pengembangan komoditi perkebunan selain kopi dan tebu;
4. Tingginya luasan lahan kritis
5. Rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal
6. Tingginya perambahan dan tekanan terhadap eksistensi kawasan hutan

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah

Visi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

***"Terwujudnya Pembangunan Sektor Perkebunan
dan Kehutanan Berorientasi Peningkatan
Perekonomian Masyarakat dan Kualitas
Lingkungan Menuju Masyarakat Aceh Tengah
Sejahtera Tahun 2017"***

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi-misi yang ditetapkan adalah :

1. Mengoptimalkan potensi komoditi perkebunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi hutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.
3. Melaksanakan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan hutan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah

Berdasarkan perumusan tujuan dan perumusan sasaran pelayanan jangka menengah maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah.

Tujuan jangka menengah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah meliputi :

- a. Misi 1, dengan tujuan :
 - 1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan unggulan lokal.
 - 2. Meningkatkan nilai tambah komoditi perkebunan unggulan lokal.
 - 3. Mengembangkan komoditi pertanian/perkebunan potensial.

- b. Misi 2, dengan tujuan :
 - 1. Melaksanakan penataan hutan untuk mendukung usaha kehutanan masyarakat.
 - 2. Mengendalikan ketersediaan kayu untuk kebutuhan lokal.

- c. Misi 3, dengan tujuan :
 - 1. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan.
 - 2. Melaksanakan upaya-upaya perlindungan hutan.

Tujuan dan sasaran tersebut beserta indikatornya selengkapanya disajikan pada tabel 9.

Tabel 9
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan unggulan lokal	Berkurangnya tanaman kebun kopi tua/rusak	5.000 Ha	1.000 Ha	1.000 Ha	1.000 Ha	1.000 Ha	1.000 Ha
		Kebun tebu rakyat	2.000 Ha	40 Ha	460 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha
		Berkurangnya serangan hama/ penyakit tanaman kopi	8.000 Ha	650 Ha	1.350 Ha	2.000 Ha	2.000 Ha	2.000 Ha
		Jalan produksi perkebunan	90 Km	10 Km	20 Km	20 Km	20 Km	20 Km
		Intensifikasi tanaman kopi rakyat	800 Ha	0 Ha	200 Ha	200 Ha	200 Ha	200 Ha
		Kebun induk kopi Arabica Gayo 1 dan Gayo 2	4 Unit	0 Unit	4 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit
2.	Meningkatkan nilai tambah komoditi perkebunan unggulan lokal	Unit pengolahan pasca panen kopi (pulper)	200 Unit	0 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit
		Unit pengolahan pasca panen tebu	8 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
3.	Mengembangkan komoditi pertanian/perkebunan potensial	Kebun kakao rakyat	1.000 Ha	100 Ha	150 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha
		Budidaya tanaman tembakau	400 Ha	40 Ha	60 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha
		Budidaya tanaman jahe	40 Ha	3 Ha	7 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha
		Budidaya tanaman kapulaga	40 Ha	3 Ha	7 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha
4.	Melaksanakan penataan hutan untuk mendukung usaha kehutanan masyarakat	Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKM)	4 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
		Terbangunnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	4 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
5.	Mengendalikan ketersediaan kayu untuk kebutuhan lokal	Terlaksananya sosialisasi peredaran kayu lokal	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
6.	Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan	Berkurangnya lahan kritis	1.700 Ha	200 Ha	300 Ha	400 Ha	400 Ha	400 Ha
7.	Melaksanakan upaya-upaya perlindungan hutan	Tenaga polisi hutan	12 Orang	0 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
		Pos pengamanan hutan	4 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
		Operasional pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim
		Pembuatan batas vegetasi kawasan hutan	46 Km	6 Km	10 Km	10 Km	10 Km	10 Km

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah

Strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan disajikan pada tabel 10.

Tabel 10

Strategi dan Kebijakan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah

VISI :			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan unggulan lokal	Berkurangnya tanaman kebun kopi tua/rusak		
	Kebun tebu rakyat		
	Berkurangnya serangan hama/ penyakit tanaman kopi		
	Jalan produksi perkebunan		
	Intensifikasi tanaman kopi rakyat		
	Kebun induk kopi Arabica Gayo 1 dan Gayo 2		
Meningkatkan nilai tambah komoditi perkebunan unggulan lokal	Unit pengolahan pasca panen kopi (pulper)		
	Unit pengolahan pasca panen tebu		
Mengembangkan komoditi pertanian/perkebunan potensial	Kebun kakao rakyat		
	Budidaya tanaman tembakau		
	Budidaya tanaman jahe		
	Budidaya tanaman kapulaga		
Melaksanakan penataan hutan untuk mendukung usaha kehutanan masyarakat	Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm)		
	Terbangunnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR)		
Mengendalikan ketersediaan kayu untuk kebutuhan lokal	Terlaksananya sosialisasi peredaran kayu lokal		
Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan	Berkurangnya lahan kritis		
Melaksanakan upaya-upaya perlindungan hutan	Tenaga polisi hutan		
	Pos pengamanan hutan		
	Operasional pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan		
	Pembuatan batas vegetasi kawasan hutan		

MISI 2 :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan unggulan lokal	Berkurangnya tanaman kebun kopi tua/rusak Kebun tebu rakyat Berkurangnya serangan hama/ penyakit tanaman kopi Jalan produksi perkebunan Intensifikasi tanaman kopi rakyat Kebun induk kopi Arabica Gayo 1 dan Gayo 2		
Meningkatkan nilai tambah komoditi perkebunan unggulan lokal	Unit pengolahan pasca panen kopi (pulper) Unit pengolahan pasca panen tebu		
Mengembangkan komoditi pertanian/perkebunan potensial	Kebun kakao rakyat Budidaya tanaman tembakau Budidaya tanaman jahe Budidaya tanaman kapulaga		
Melaksanakan penataan hutan untuk mendukung usaha kehutanan masyarakat	Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terbangunnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR)		
Mengendalikan ketersediaan kayu untuk kebutuhan lokal	Terlaksananya sosialisasi peredaran kayu lokal		
Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan	Berkurangnya lahan kritis		
Melaksanakan upaya-upaya perlindungan hutan	Tenaga polisi hutan Pos pengamanan hutan Operasional pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan Pembuatan batas vegetasi kawasan hutan		

MISI 3 :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan unggulan lokal	Berkurangnya tanaman kebun kopi tua/rusak Kebun tebu rakyat Berkurangnya serangan hama/ penyakit tanaman kopi Jalan produksi perkebunan Intensifikasi tanaman kopi rakyat Kebun induk kopi Arabica Gayo 1 dan Gayo 2		
Meningkatkan nilai tambah komoditi perkebunan unggulan lokal	Unit pengolahan pasca panen kopi (pulper) Unit pengolahan pasca panen tebu		
Mengembangkan komoditi pertanian/perkebunan potensial	Kebun kakao rakyat Budidaya tanaman tembakau Budidaya tanaman jahe Budidaya tanaman kapulaga		
Melaksanakan penataan hutan untuk mendukung usaha kehutanan masyarakat	Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terbangunnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR)		
Mengendalikan ketersediaan kayu untuk kebutuhan lokal	Terlaksananya sosialisasi peredaran kayu lokal		
Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan	Berkurangnya lahan kritis		
Melaksanakan upaya-upaya perlindungan hutan	Tenaga polisi hutan Pos pengamanan hutan Operasional pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan Pembuatan batas vegetasi kawasan hutan		

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah

Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi	
					2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPK				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2 01 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	2 01 02 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan benda pos, material 1100 lembar dan jasa pos						1 Paket	2.000.000									
	2 01 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, air, dan telepon/faximile						1 Paket	30.000.000									
	2 01 02 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran honorarium cleaning service dan penjaga kantor						8 Orang	67.200.000									
	2 01 02 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Service komputer PC, notebook, mesin ketik						1 Paket	10.000.000									
	2 01 02 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor						1 Paket	30.000.000									
	2 01 02 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan/fotocopy						1 Paket	20.000.000									
	2 01 02 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan						1 Paket	5.000.000									
	2 01 02 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan komputer/notebook/printer						1 Paket	20.000.000									
	2 01 02 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan surat kabar dan bahan bacaan						1 Paket	2.000.000									
	2 01 02 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-Makan minum harian pegawai, 89 orang -Makan minum harian tenaga Pamhut, 122 orang						1 Tahun	60.000.000									
	2 01 02 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas keluar daerah						1 Tahun	12.000.000.000									
	2 01 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	2 01 02 02 10	Pengadaan Mobiler	Pengadaan mobiler kantor						1 Paket	30.000.000									
	2 01 02 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rehabilitasi dan perawatan bangunan/gedung kantor						1 Paket	150.000.000									
	2 01 02 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Penggantian suku cadang, jasa service, accu, BBM, oli						1 Tahun	65.000.000									

Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
					2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPK			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

2 01 02 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan																		
2 01 02 16 02	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	- Tersedianya data komoditas perkebunan dan pemutahiran data komoditas perkebunan							1 Paket	300.000.000									
2 01 02 16 12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	- Pengadaan mesin pemecah buah kakao, 1 unit - Pengadaan kotak fermentasi kakao, 1 unit - Pengadaan mesin pengering kakao (dryer), 1 unit							1 Unit	0									
		- Pengadaan Hand Pulper							50 Unit	0									
		- Pengadaan Huller Mini							4 Unit	0									
		- Pengadaan Mesin Gilingan Bubuk Kopi							5 Unit	0									
		- Biaya Umum							1 Paket	0									
		- Fasilitas Sarana Bangunan dan Peralatan Pasca Panen Kopi - Huller (Dijien, PPHF)							1 Unit	0									
		- Fasilitas Agro Industri Kopi Bubuk (Dijien, PPHF)							1 Paket	0									
2 01 02 16 17	Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	- Pengembangan Budidaya Kapulaga - Pengembangan Budidaya Jahe Merah - Pengembangan Budidaya Serai Wangi - Pengadaan Bibit Kemiri - Pengadaan Bibit Kelapa							60 Ha	0									
		- Biaya Umum							1 Paket	0									
2 01 02 16 29	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan/Pertanian (DBH-Cukai Hasil Tembakau)	- Terlaksananya pengembangan budidaya tembakau							1 Paket	500.000.000									

Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
					2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPK			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

2 01 02 18 2 01 02 18 02	Program Peningkatan Penerapan Teknologi/Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	-Operasional laboratorium pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan																			
		-Biaya Umum																			
		Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO)																			
		-Biaya Umum																			
2 01 02 19 2 01 02 19 02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	-Pengadaan Pupuk Organik, 1.500 Ton																			
		-Pengadaan Mesin Babat, 300 Unit																			
		-Biaya Umum																			
		-Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika (Dijel. Perkebunan)																			
		-Integrasi Tanaman Kopi - Temak (Dijel. Perkebunan)																			
		-Perluasan Tanaman Tebu (Dijel. Perkebunan)																			
2 01 02 19 03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	-Pengadaan Bibit Kopi Gayo-1 dan Kopi Gayo-2																			
		-Pengadaan Bibit Tanaman Pelindung Kopi																			
		-Biaya Umum																			
		-Operasional Kebun Induk Kopi Gayo-1 dan Kopi Gayo-2																			
2 01 02 19 07	Pengadaan Sarana Produksi Perkebunan (DAK Bidang Pertanian)	-Pembukaan jalan produksi																			
		-Biaya Pendamping																			
		-Biaya Umum																			
2 01 02 19 08	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan	-Pengadaan sarana pengendalian hama PBKo, 24 kelompok tani																			
		-Pengadaan bahan pengendalian jamur Akar Kopi (Trichoderma sp), 50 Ha																			
		-Biaya Umum																			

Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
					2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPK			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

2 02 02 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan																		
2 02 02 15 02	Pengembangan Hutan Tanaman	- Terlaksananya fasilitasi pengembangan unit usaha hutan tanaman rakyat (URTR)							1 Unit	200.000.000									
2 02 02 15 03	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pengembangan hasil hutan non kayu oleh masyarakat							1 Paket	300.000.000									
2 02 02 15 05	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	- Terlaksananya fasilitasi pengembangan hutan kemasyarakatan (HKM)							1 Unit	200.000.000									
2 02 02 15 08	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	- Terlaksananya pengendalian peredaran hasil hutan							1 Paket	150.000.000									
2 02 02 15 09	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	- Terlaksananya perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan							1 Paket	100.000.000									
2 02 02 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
2 02 02 16 01	Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan	- Tersedianya dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) Tahun 2016							1 Paket	100.000.000									
2 02 02 16 02	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	- Terbangunnya kebun bibit permanen untuk mendukung ketersediaan bibit bagi penghijauan lingkungan							1 Paket	0									
		- Biaya Umum							1 Paket	70.000.000									
2 02 02 16 06	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
		- Pembuatan Tanaman Reboisasi							100 Ha	800.000.000									
		- Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat							50 Ha	375.000.000									
		- Pemeliharaan I Tanaman Reboisasi Tahun 2014							100 Ha	350.000.000									
		- Penghijauan Lingkungan							1 Paket	100.000.000									
		- Pengadaan Sarana/ Prasarana Pengamanan Hutan							1 Paket	300.000.000									
		- Pengadaan Sarana/ Prasarana Penyuluh Kehutanan							1 Paket	100.000.000									
		- Pembuatan Tanaman Reboisasi							400 Ha	0									
		- Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat							150 Ha	0									
		- Pemeliharaan I Tanaman Reboisasi Tahun 2014							300 Ha	0									
		- Pemeliharaan II Tanaman Reboisasi Tahun 2013							100 Ha	0									
		- Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)							4 Unit	0									
2 02 02 16 08	Penghijauan Lingkungan	- Tersedianya bibit kehutanan bagi kegiatan penghijauan lingkungan oleh masyarakat							1 Paket	0									
		- Biaya Umum							1 Paket	14.000.000									

Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
					2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPK			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

2 02 02 17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan																	
2 02 02 17 01		Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Terlaksananya operasional pengamanan hutan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan						1 Paket	900.000.000									
2 02 02 17 04		Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	- Tersedianya sarana/ prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan - Biaya Umum						1 Paket	0									
2 02 02 17 05		Inventarisasi Flora dan Fauna yang Dilindungi	- Tersedianya data untuk program pelestarian flora dan fauna dilindungi						1 Paket	150.000.000									
2 02 02 19		Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan																	
2 02 02 19 02		Sosialisasi Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan	- Sosialisasi peraturan pemanfaatan hutan dan hasil hutan kepada stakeholders						1 Paket	100.000.000									
2 02 02 20		Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan																	
2 02 02 20 04		Perencanaan Hutan	- Tersedianya dukungan operasional bagi revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten						1 Paket	100.000.000									

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
ACEH TENGAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJM KABUPATEN ACEH TENGAH

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, Dinas Perkebunan dan Kehutanan memuat indikator-indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Indikator kinerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Aceh Tengah disajikan pada Tabel 12.

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah Tahun 2012-2017 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah lima tahun ke depan dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah Tahun 2012-2017. Keberhasilan pelaksanaan renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf, dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan renstra, termasuk revisi indikator kinerjanya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah harus melaksanakan amanat renstra secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Takengon, Desember 2013

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
DAN KEHUTANAN ACEH TENGAH**

Ir. SAHRIAL
Pembina Utama Muda
NIP. 19641012 199103 1 007